

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

2023

DPMPTSPPTK

Jalan Perwira Nomor 33, Belakang Balok, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan kewajiban Perangkat Daerah setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang memuat program dan kegiatan lima tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai tatacara dan sistematika dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Tahun 2023 merupakan periode kedua dari Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2021-2026. Keberhasilan capaian target Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahatan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi NOmor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.

9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, perindustrian dan ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Tahun Lalu dan capaian Renstra DPMPTSPPTK
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting mengenai pelaksanaan dan ketersediaan anggaran;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas 3 Bidang Urusan yakni :

1. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2. Bidang urusan Pemerintahan Bidang tenaga Kerja
3. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melaksanakan 11 Program, 18 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran dan Realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Pagu Tahun Anggaran 2021 termasuk Perubahan, Belanja DPNPTSPPTK adalah Rp.20.889.763.116,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. 7.225.560.455,- |
| - Belanja Langsung | Rp. 5.490.817.661,- |
| - Belanja Modal | Rp. 8.173.385.000,- |

Sedangkan anggaran pendapatan Rp. 570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- | | |
|--|-------------------|
| - Retribusi Pemakaian kekayaan daerah | Rp. 70.000.000,- |
| - Retribusi Pemberian izin Mendirikan Bangunan | Rp. 500.000.000,- |

- b. Realisasi Anggaran belanja pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.18.036.907.761,- (Delapan belas milyar tiga puluh enam juta Sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) atau 95,82% dari pada anggaran dengan rincian :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Belanja Tidak Langsung (86%) | Rp. 6.047.201.033,- |
| - Belanja Langsung (95,7%) | Rp. 11.989.706.728,- |

Sedangkan realisasi anggaran pendapatan mencapai 90,63% dengan nilai realisasi keuangan Rp. 516.606.337,- (Lima ratus enam belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah), yang terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah 113% Rp. 79.122.500,-
- Retribusi Pemberian izin Mendirikan Bangunan (87,50%) Rp. 437.483.837,-

Sedangkan Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melaksanakan 11 Program, 18 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan Triwulan ke 2 sebagai berikut :

- a. Pagu Belanja 2022 sebesar Rp 12.496.856.373,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Yang terdiri atas :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 6.954.918.247,-
- Belanja Langsung Rp. 5.541.938.126,-

Sedangkan anggaran pendapatan Rp.820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta Rupiah), yang terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Rp. 70.000.000,-
- Retribusi Pemberian izin Mendirikan Bangunan Rp. 750.000.000,-

- b. Sampai dengan akhir Trriwulan ke II Tahun 2022 Realisasi Anggaran belanja telah mencapai Rp.4.348.647.485,- (Empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) atau 34,80% dari total anggaran dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.987.684.359,-
- Belanja Langsung Rp. 1.360.963.126,-

Sedangkan realisasi anggaran pendapatan mencapai 7,75% dengan nilai realisasi keuangan Rp. 63.576.750,- (Enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah, (47,97%) Rp. 33.576.750,-
- Retribusi Pemberian izin Mendirikan Bangunan (4%) Rp. 30.000.000,-

Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi melaksanakan Program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian Misi 1 “Hebat dalam sektor peningkatan Ekonomi Kerakyatan” dan Misi 5 “Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan”.

Adapun Indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi Tanggung jawab DPMPTSPPTK yang dimulai dari kondisi awal RPJMD, beserta target capaian Rencana

Strategis SKPD setiap Tahunnya dan target capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD disajikan dalam Tabel T-C. 2.8 berikut;

TABEL T-C.2.8
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 1 | Pengeluaran Perkapita | 13.445 | 13.509 | 13.746 | 14.035 | 14.345 | 14.680 | 14.680 |
| 2 | Persentase realisasi Investasi Hijau | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 3 | Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 3,9 | 4,2 | 5,5 | 5,9 | 60,0 | 6,1 | 6,1 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,35 | 7,18 | 6,96 | 6,74 | 6,48 | 6,20 | 6,20 |

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022 (tahun berjalan)* dapat disajikan pada Tabel T-C.29 berikut;

TABEL TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (Tahun Berjalan) 2021 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022 | |
|------|----|---|------|----|---|--|--|---|---|----------------|-----------------------|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi | Tingkat Capaian (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | TOTAL | | 34.170.309.174 | 0 | 2.551.076.591 | 2.288.985.101 | 8 | 19.597.509.975 | 21.886.495.076 | 64% |
| | | | | | Non Urusan | | 15.096.014.652 | | | | | 12.419.528.614 | | |
| 2 | 18 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip SKPD | 15.096.014.652 | | 17.952.750 | 16.489.300 | 92% | 12.419.528.614 | 12.436.017.914 | 82% |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 26.182.005 | | 17.952.750 | 16.489.300 | 92% | 21.540.000 | 38.029.300 | 145% |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 01 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 26.182.005 | | 17.952.750 | 16.489.300,00 | 92% | 21.540.000 | 38.029.300 | 145% |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 9.603.742.109 | | | | | 7.901.022.400 | 7.901.022.400 | 82% |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 1 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan | 9.603.742.109 | | | | | 7.901.022.400 | 7.901.022.400 | 82% |
| 2 | 18 | 1 | 2.03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan keuangan dan Aset tepat waktu | 432.875.810 | | 327.195.000 | 316.764.027 | 97% | 356.128.000 | 672.892.027 | 155% |
| 2 | 18 | 1 | 2.03 | 2 | Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah jasa pengamanan kantor | 432.875.810 | | 327.195.000 | 316.764.027,00 | 97% | 356.128.000 | 672.892.027 | 155% |
| | | | | | | Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor | | | | | | | | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 182.325.938 | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 82% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|---|---------------|--|---------------|------------------|-----|---------------|---------------|------|
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti diklat | 182.325.938 | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 82% |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.030.709.310 | | 2.235.525.100 | 1.985.837.870 | 89% | 847.967.100 | 2.833.804.970 | 275% |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 01 | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan listrik yang dibeli | 7.455.915 | | 6.134.000 | 5.904.000,00 | 96% | 6.134.000 | 12.038.000 | 161% |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 2 | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan | 607.753.125 | | 1.939.848.000 | 1.738.113.111,00 | 90% | 500.000.000 | 2.238.113.111 | 368% |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 4 | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis alat tulis yang dibeli | 28.495.235 | | 23.443.100 | 22.784.350,00 | 97% | 23.443.100 | 46.227.450 | 162% |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 5 | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan | 24.589.691 | | 20.230.000 | 16.849.400,00 | 83% | 20.230.000 | 37.079.400 | 151% |
| | | | | | | Jumlah dokumen yang dijilid | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 8 | Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur | 10.477.664 | | 23.530.000 | 18.009.900,00 | 77% | 8.620.000 | 26.629.900 | 254% |
| | | | | | | Jumlah makan minum tamu difasilitasi | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 9 | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri | 351.937.680 | | 222.340.000 | 184.177.109,00 | 83% | 289.540.000 | 473.717.109 | 135% |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | 744.793.432 | | 6.082.380.000 | 5.517.066.379,00 | 91% | 612.743.400 | 6.129.809.779 | 823% |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 01 | Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru | 744.793.432 | | | | | 612.743.400 | 612.743.400 | 82% |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 9 | Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru | 0 | | 6.082.380.000 | 5.517.066.379,00 | 91% | | 5.517.066.379 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.107.274.565 | | 1.383.660.000 | 759.188.962 | 55% | 1.733.660.000 | 2.492.848.962 | 118% |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 1 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 | 4.448.753 | | 3.660.000 | 2.769.800,00 | 76% | 3.660.000 | 6.429.800 | 145% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|---|----------------|--|---------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
| | | | | | | Jumlah materai 6000 | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 02 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rek air yang dibayar | 2.102.825.813 | | 1.380.000.000 | 756.419.162,00 | 55% | 1.730.000.000 | 2.486.419.162 | 118% |
| | | | | | | Jumlah rek internet yang dibayar | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah rek listrik yang dibayar | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah rek telepon yang dibayar | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | 968.111.484 | | 594.498.800 | 508.271.600 | 85% | 796.467.714 | 1.304.739.314 | 135% |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 01 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan eselon 2 yang diperlihara | 50.091.013 | | 41.210.000 | 25.328.999,00 | 61% | 41.210.000 | 66.538.999 | 133% |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 02 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara | 193.182.110 | | 178.931.400 | 124.999.891,00 | 70% | 158.931.400 | 283.931.291 | 147% |
| | | | | | | Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | | | | | | 0 | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 06 | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jasa perbaikan peralatan kantor | 6.879.765 | | 5.660.000 | 2.535.000,00 | 45% | 5.660.000 | 8.195.000 | 119% |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 09 | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jenis alat kebersihan yang diadakan | 717.958.596 | | 368.697.400 | 355.407.710,00 | 96% | 590.666.314 | 946.074.024 | 132% |
| | | | | | | Jml. jasa cleaning service | | | | | | | | |
| | | | | | | Jml. Pemeliharaan gedung kantor | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | 14.680.000.000 | | | | | 3.414.680.000 | 3.414.680.000 | 23% |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota | Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna | 14.680.000.000 | | | | | 3.414.680.000 | 3.414.680.000 | 23% |
| | | | | | | Peningkatan jumlah penjualan IKM | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|---|-------------|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | Jum IKM difasilitasi pameran dan promosi | 150.000.000 | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan IT | 150.000.000 | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | | | Jum peserta pelatihan diverfikasi prod kulit | 300.000.000 | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi IT | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi produk kulit | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jumlah peserta magang kerajinan kulit | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jum kelompok sepatu sandal yang dibina | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 100% | |
| | | | | | | peserta pelatihan diversifikasi produk kerajinan | 300.000.000 | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 100% | |
| | | | | | | peserta pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi IT kerajinan | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jum peserta yang difasilitasi pameran dan promosi kerajinan | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jumlah kelompok kerajinan yang dibina | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 100% | |
| | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi sanitasi berkala | | | | | 55.000.000 | 55.000.000 | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 04 | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | 402.500.000 | | 464.818.366 | 417.935.019 | 90% | 500.000.000 | 917.935.019 | 228% |
| | | | | | | Jumlah tempat promosi industri yang diadakan | | | 462.460.766 | 416.289.019,00 | 90% | | 416.289.019 | |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung UPTD | 2.500.000 | | 2.357.600 | 1.646.000,00 | 70% | 500.000.000 | 501.646.000 | 20066% |
| | | | | | | Jumlah operasional UPTD yang dikelola | 200.000.000 | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | | | Jumlah IKM yang difasilitasi | 200.000.000 | | | | | | 0 | 0% |
| 3 | 31 | 4 | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | 345.000.000 | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 22% |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase pemenuhan data dan informasi industri | 345.000.000 | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 22% |
| | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Persentase pemenuhan data SIINAS | 95.000.000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|------|
| | | | | | Sub kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional | Jml. Dokumen laporan industri | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | 02 | Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data industri | 250.000.000 | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 30% |
| | | | | | | Pertumbuhan PMTB | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase realisasi investasi hijau | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks kemudahan berusaha | | | | | | | | |
| | | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | 95.000.000 | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 53% |
| | | | | | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Persentase penerbitan IUI kecil dan menengah | 95.000.000 | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 53% |
| | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Jumlah peserta bintak/ sosialisasi perlindungan HAKI, merk, paten hak cipta dan desain industri | 95.000.000 | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 53% |
| | | | | | Program pengembangan iklim Penanaman Modal | Persentase kemudahan berusaha | 0 | | 133.977.450 | 131.646.900 | 98% | 309.220.000 | 440.866.900 | |
| | | | | | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal | 0 | | 133.977.450 | 131.646.900 | 98% | 309.220.000 | 440.866.900 | |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jml. Peta potensi investasi | | | 133.977.450 | 131.646.900,00 | 98% | 50.220.000 | 181.866.900 | |
| | | | | | Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal | Jumlah perda | | | | | | 259.000.000 | 259.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah peta | | | | | | | 0 | |
| 2 | 18 | 5 | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan | 160.000.000 | | 384.856.673 | 305.711.795 | 79% | 89.923.000 | 395.634.795 | 247% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|--|-------------|--|-------------|----------------|-----|-------------|---------------|------|
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM | 160.000.000 | | 384.856.673 | 305.711.795 | 79% | 89.923.000 | 395.634.795 | 247% |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 03 | Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pemantauan penanaman modal; Jumlah pengawasan penanaman modal; Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | | | 326.122.000 | 247.774.711,00 | 76% | 89.923.000 | 337.697.711 | |
| | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | 160.000.000 | | | | | 89.923.000 | 89.923.000 | 56% |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 03 | | Jumlah laporan penanaman modal perusahaan | 160.000.000 | | 58.734.673 | 57.937.084,00 | 99% | | 57.937.084 | 36% |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 3 | | | Program Promosi Penanaman Modal | Nilai realisasi investasi hijau | 350.000.000 | | 153.749.000 | 152.736.500 | 99% | 451.740.000 | 604.476.500 | 173% |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase ketersediaan media dan sarana promosi | 350.000.000 | | 153.749.000 | 152.736.500 | 99% | 451.740.000 | 604.476.500 | 173% |
| | | | | | | Persentase penambahan jumlah calon investor | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kerjasama investasi yang difasilitasi | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 02 | Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | | 285.000.000 | | 153.749.000 | 152.736.500,00 | 99% | 301.520.000 | 454.256.500 | 159% |
| | | | | | | Jml. Pameran investasi yang diikuti | 195.000.000 | | | | | 192.520.000 | 192.520.000 | 99% |
| | | | | | | Jml. Kejasama investasi | 90.000.000 | | | | | 109.000.000 | 109.000.000 | 121% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 1 | Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | | 65.000.000 | | | | | 150.220.000 | 150.220.000 | 231% |
| | | | | | | Jml. Dokumen yang disusun | | | | | | 150.220.000 | 150.220.000 | |
| | | | | | | Jml. Web promosi yang dikelola | 65.000.000 | | | | | | | |
| 2 | 07 | 3 | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri | 459.450.000 | | 581.233.850 | 523.792.170,00 | 90% | 855.748.510 | 1.379.540.680 | 300% |
| 2 | 07 | 3 | 2.01 | | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan | 424.450.000 | | 581.233.850 | 523.792.170,00 | 90% | 759.748.510 | 1.283.540.680 | 302% |
| | | | | | | Besaran pencari kerja yang bersertifikat keterampilan | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 3 | 2.01 | 1 | Sub kegiatan Proses Pelaksanaan | | 424.450.000 | | 581.233.850 | 523.792.170,00 | 90% | 759.748.510 | 1.283.540.680 | 302% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|--|-------------|--|------------|---------------|-----|-------------|-------------|------|
| | | | | | | Jml. Penerbitan kartu pencari kerja | | | | | | | | |
| | | | | | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | % pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja | 630.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jml. Informasi lowongan kerja | 130.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | Sub kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja | Jml. Job fair yang dilaksanakan | 500.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | Persentase konflik ketenagakerjaan yang tertangani | | | | | | | | |
| | | | | | | Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 5 | | | Program Hubungan Industrial | Persentase penurunan kasus hubungan industrial | 110.000.000 | | 77.900.000 | 58.506.952 | 75% | 143.900.000 | 202.406.952 | 184% |
| | | | | | | Jumlah tenaga kerja yang menerima BPJS | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan | 110.000.000 | | 77.900.000 | 58.506.952 | 75% | 143.900.000 | 202.406.952 | 184% |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Persentase kasus HI yang tertangani dengan baik | | | | | | | 0 | |
| 2 | 07 | 5 | 2.01 | 1 | Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jml. Perusahaan yang dibina | 60.000.000 | | 38.450.000 | 35.534.703 | 92% | 72.450.000 | 107.984.703 | 180% |
| 2 | 07 | 5 | 2.01 | 2 | Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Kasus yang terselesaikan | 50.000.000 | | 39.450.000 | 22.972.249,00 | 58% | 71.450.000 | 94.422.249 | 189% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase peserta sosialisasi jaminan kesehatan pekerja | 70.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jml. Peserta sosialisasi | 70.000.000 | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | | | Indeks kepuasan masyarakat pada setiap OPD | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perizinan | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase pelayanan perizinan secara online | 1.954.844.522 | | 1.080.108.368 | 984.332.129 | 91% | 1.615.398.351 | 2.599.730.480 | 133% |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | | Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizinan | 1.954.844.522 | | 1.080.108.368 | 984.332.129 | 91% | 1.615.398.351 | 2.599.730.480 | 133% |
| | | | | | | Persentase pemenuhan teknologi informasi perizinan | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan perizinan selesai tepat waktu | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM pengelola perizinan terlatih | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan perizinan | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 01 | Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | 1.692.844.522 | | 1.022.027.168 | 939.453.824.00 | 92% | 1.171.939.839 | 2.111.393.663 | 125% |
| | | | | | | Jml. Izin yang diterbitkan secara online | 1.637.844.522 | | | | | 1.171.939.839 | 1.171.939.839 | 72% |
| | | | | | | Jml. Aplikasi perizinan yang dikelola | | | | | | | | |
| | | | | | | Jml. Pengembangan yang dilakukan | 55.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | | Jml. Web yang dibuat | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 02 | Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan | | 145.000.000 | | | | | 329.103.762 | 329.103.762 | 227% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|---|----------------|---|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|------|
| | | | | | Non Perizinan Penanaman Modal | Jml. Perwako yang disusun | 70.000.000 | | 39.936.650 | 30.922.212,00 | 77% | 54.103.762 | 85.025.974 | 121% |
| | | | | | | Jml. Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jml. Laporan koordinasi dan pengawasan perizinan | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Jml. Rancangan produk hukum | 75.000.000 | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 03 | Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | | 117.000.000 | | 18.144.550 | 13.956.093,00 | 77% | 114.354.750 | 128.310.843 | 110% |
| | | | | | | persentase Pengaduan yang tertangani | 32.000.000 | | | | | 19.354.750 | 19.354.750 | 60% |
| | | | | | | Jml. Dokumen IKM | 85.000.000 | | | | | 95.000.000 | 95.000.000 | 112% |
| 2 | 18 | 6 | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data informasi perizinan secara online | 185.000.000 | | 78.420.000 | 77.944.605 | 99% | 50.000.000 | 127.944.605 | 69% |
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase laporan perizinan online tepat waktu | 185.000.000 | | 78.420.000 | 77.944.605 | 99% | 50.000.000 | 127.944.605 | 69% |
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jml. Laporan data perizinan | 105.000.000 | | 78.420.000 | 77.944.605,00 | 99% | 50.000.000 | 127.944.605 | 122% |
| | | | | | | persentase informasi perizinan yang disediakan | | | | | | | | |
| | | | | | | Jml. Web dan profil digital MPP | 80.000.000 | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 63% |
| | | | | | | Jml. Arsip yang dikelola secara digital | | | | | | | 0 | |
| | | | | | TOTAL | | 34.170.309.174 | 0 | 2.551.076.591 | 2.288.985.101 | 8 | 19.597.509.975 | 21.886.495.076 | 64% |

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi disajikan dalam tabel T.C.30, secara umum capaian target kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan ke 2 Tahun 2022 (Tahun berjalan) telah sesuai dengan yang seharusnya. Berikut indikator dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL. T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PTSP
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra DPMPSTPPTK | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|----|---|-----------------------------|-----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 1. | Pengeluaran Perkapita | | | 13.721,86 | 13.859,08 | 13.997,67 | 14.137,65 | 13.721,86 | | 13.997,67 | 14.137,65 |
| 2. | Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | | | 5,24% | 5,29% | 5,35% | 5,40% | 5,03% | 5,05% | 5,35% | 5,40% |
| 3. | Persentase realisasi Investasi Hijau | | | 60% | 65% | 70% | 75% | 6,10% | 6,10 | 70% | 75% |
| 4 | Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | | | 3,80% | 4,00% | 4,20% | 4,00% | 3,80% | 3,80% | 4,20% | 4,00% |
| 5 | Indeks Kemudahan berusaha | | | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | 6,02% | 5,96% | 5,90% | 5,84% | 7,15% | 7,15% | 5,90% | 5,84% |
| 7 | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja | | | 70,01% | 70,71% | 71,42% | 72,13% | 70,01% | 70,01% | 71,42% | 72,13% |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan | | | 90,01 | 92,22 | 95,03 | 96,08 | 82,93 | 82,93 | 95,03 | 96,08 |

Disamping capaian kinerja pelayanan yang baik masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja.

2. Pengembangan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi dalam penerbitan izin, pengawasan, data perizinan, penerbitan kartu pencari kerja, informasi pasar kerja dan promosi produk industri.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan gedung kantor dan fasilitas yang representatif sesuai standar Mall Pelayanan Publik sehingga masih belum mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan industri.
6. Keterbatasan tenaga fungsional industri dan fungsional ketenagakerjaan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil menengah dan kelompok usaha bersama. Serta pembinaan dan fasilitasi untuk perusahaan, pencari kerja dan pekerja/buruh.
7. Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah untuk promosi, kemasan dan label halal sebagai pendukung kualitas produk dalam pemasarannya.
8. Masih rendahnya kesempatan kerja disebabkan tidak sesuainya kapasitas pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
9. Masih belum optimalnya hubungan industrial yang baik, dilihat belum meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan pendukung lainnya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simflikasi, Keamanan dan Kepastian.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai

perwujudan pandangan ideal dari hal - hal yang harus dicapai di masa yang akan datang, diperlukan penguasaan informasi tentang masalah - masalah penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja baik dalam lingkungan internal maupun external.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja diantaranya :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pada pasal 14 point 3 dinyatakan bahwa DPMPTSPPTK tidak dibebani target penerimaan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, sementara sampai dengan saat ini (Tahun Anggaran 2022), Dinas PMPTSPPTK masih dibebani target penerimaan Retribusi
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta mempermudah dan mempercepat proses pelayanan (cepat, tepat dan transparan)
3. Pelayanan Perizinan bidang Penanaman Modal yang diberikan DPMPTSPPTK telah dilaksanakan secara On-Line tetapi tetap perlu pengembangan sehingga 81 jenis izin yang dikelola dapat dilayani secara On-Line seluruhnya
4. Perlu penyempurnaan regulasi perizinan dan penyempurnaan SOP (Standar Operasional Pelayanan) sehingga proses pengurusan isi dapat selesai tepat waktu yang akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan sesuai standarisasi yang ada, yang juga perlu didukung dengan penganggaran yang memadai
6. Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada DPMPTSPPTK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai analisa jabatan seharusnya berjumlah 80 orang sesuai dengan Analisis Jabatan, sedangkan kondisi saat hanya berjumlah 54 orang
7. Selain itu dengan telah ditetapkannya aturan tentang peralihan dari Jabatan Struktural ke jabatan fungsional, berdampak pada sulitnya mengisi formasi jabatan yang telah kosong akibat personil yang menduduki jabatan tersebut

pension, karena untuk mengisi formasi JFT tentunya harus melalui pengangkatan pada JFT melalui proses Uji kompetensi

8. Pembinaan dan pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam meningkatkan IKM yang berkualitas dan berdaya saing
9. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ketenagakerjaan masih sangat terbatas, baik dalam pelayanan dan penempatan tenaga kerja juga sarana dan prasarana pelatihan.

Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi saat ini telah menempati Gedung Baru yang mana selain perkantoran, juga berfungsi sebagai Mall Pelayanan Publik, yang telah bekerjasama dengan lebih kurang 19 instansi baik vertikal maupun Pemerintah kota Bukittinggi sendiri.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja.
3. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja belum optimal
5. Aplikasi perizinan telah dilaksanakan secara Online dan perlu terus dilakukan pengembangan aplikasi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. DPMPSTP pada Tahun Anggaran 2023, tidak lagi dibebani target penerimaan Retribusi
2. Menjadi fasilitator administrasi perizinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;

3. Tertatanya aturan perizinan yang akurat dan lancarnya pelaksanaan pengawasan perizinan;
4. Tersedianya dokumentasi perizinan;
5. Lancarnya pelayanan proses perizinan dan Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan semua OPD pengelola izin;
6. Tersedianya Sistem Aplikasi Perizinan Online meliputi semua jenis izin yang dikelola;
7. Terselenggaranya publikasi media luar ruangan yang menarik dan persuasif;
8. Terlaksananya promosi investasi dan terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan UKM;
9. Mudah nya prosedur untuk mengisi jabatan fungsional tertentu, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas;
10. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan terhadap industry kecil dan menengah;
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas industry kecil dan menengah;
12. Terlaksananya proses pelayanan dan penempatan tenaga kerja yang baik;
13. Meningkatnya perlindungan, penegakkan hokum ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja;
14. Meningkatnya kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu **“Menciptakan Bukittinggi HEBAT Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Dari 7 misi Pemerintah Kota Bukittinggi periode 2021-2026, terdapat 2 misi yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja, yakni :

1. Misi 1 yaitu HEBAT dalam sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
 2. Misi 5 yaitu HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
- Dengan tujuan strategis tingkat Kota yang akan dicapai:
1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan,
 2. Terciptanya ekonomi yang merata, dan
 3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Adapun sasaran tingkat kota yaitu:

1. Meningkatnya daya beli masyarakat
2. Meningkatnya investasi hijau
3. Meningkatnya kesempatan kerja
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

TABEL TC. 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-------------------------------|----|----|------|----|---|-------------------|--|-----------------------|----------------|---|------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Total | | | 22.507.817.216 | | Total | | | | |
| | | | | | Non Urusan | | | 13.040.505.045 | | Non Urusan | | | | |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Bukittinggi | Nilai Sakip SKPD | BB | 13.040.505.045 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Bukittinggi | Nilai Sakip SKPD | BB | 9.194.814.592 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Sinkronasi Program dan Kegiatan | 100 Persen | 22.617.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Sinkronasi Program dan Kegiatan | 100 Persen | 21.758.800 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 22.617.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 21.758.800 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Keuangan | 100 persen | 8.296.073.520 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Keuangan | 100 persen | 7.095.981.016 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Bukittinggi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/bulan | 8.296.073.520 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Bukittinggi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/bulan | 7.095.981.016 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100 Persen | 373.934.400 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100 Persen | 295.336.236 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Bukittinggi | Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 bulan 0 Dokumen | 373.934.400 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Bukittinggi | Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 bulan 0 Dokumen | 295.336.236 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|---|------------------|---|------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Jumlah jasa pengamanan kantor | 9 Orang | | | | | Jumlah jasa pengamanan kantor | 9 Orang | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 157.500.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Presentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 0 |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Bukittinggi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 157.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Bukittinggi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 0 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 890.365.455 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 310.457.700 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Peralatan Listrik Yang Dibeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 45 Jenis 0 Paket | 6.440.700 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Peralatan Listrik Yang Dibeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 45 Jenis 0 Paket | 6.122.700 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Peralatan Kantor Yang Diadakan Jenis Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Jenis 0 Paket | 525.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Peralatan Kantor Yang Diadakan (kursi rapat dan kursi kerja) | 2 Jenis | 55.710.200 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Alat Tulis Yang Dibeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 46 Jenis 0 Paket | 24.615.255 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Bukittinggi | Jenis Alat Tulis Yang Dibeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 46 Jenis 1 Paket | 23.439.300 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Kota Bukittinggi | Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid | 7Jenis 30050 lembar 90 jilid | 21.241.500 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Kota Bukittinggi | Jumlah barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid | 7Jenis 30050 lembar 90 jilid | 20.225.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|-----------|---------------|--|---|--|-----------|-------------|
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 8 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota Bukittinggi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 9.051.000 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Kota Bukittinggi | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 19.860.000 |
| | | | | | | | Jumlah makan minum tamu difasilitasi | 200 Porsi | | | | Jumlah makan minum tamu difasilitasi | 200 Porsi | |
| | | | | | | | Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Lembur; Jumlah Makan Minum Tamu Difasilitasi | 12 Bulan | | | | Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Lembur; Jumlah Makan Minum Tamu Difasilitasi | 12 Bulan | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 9 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kota Bukittinggi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 304.017.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kota Bukittinggi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 185.100.000 |
| | | | | | | | Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri | | | | | Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | — | 643.380.570 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | — | 0 |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 1 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Bukittinggi | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 643.380.570 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Bukittinggi | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 0 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | 1.820.343.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | 832.240.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Bukittinggi | Jasa pengiriman paket | 12 Bulan | 3.843.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Bukittinggi | Jasa pengiriman paket | 12 Bulan | 3.040.000 |
| | | | | | | | Jumlah buku cek | 4 Buah | | | | Jumlah buku cek | 4 Buah | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------|--|------------|---------------|---|------------------|--|------------|-------------|
| | | | | | | | Jumlah materai 10000 | 200 Buah | | | | Jumlah materai 10000 | 200 Buah | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Bukittinggi | Jumlah bulan pembayaran | 12 Bulan | 1.816.500.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Bukittinggi | Jumlah bulan pembayaran | 12 Bulan | 829.200.000 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | |
| | | | | | | | Jumlah rek air, internet, listrik, telepon yang dibayar | 4 Rekening | | | | Jumlah rek air, internet, listrik, telepon yang dibayar | 4 Rekening | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik | 100 Persen | 836.291.100 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Bukittinggi | Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik | 100 Persen | 639.040.840 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Bukittinggi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 43.270.500 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Bukittinggi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 39.190.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Kota Bukittinggi | Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara | 14 unit | 166.877.970 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Kota Bukittinggi | Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara | 14 unit | 173.900.000 |
| | | | | | | | Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | 6 unit | | | | Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | 6 unit | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Bukittinggi | Jasa perbaikan peralatan kantor | 12 Bulan | 5.943.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Bukittinggi | Jasa perbaikan peralatan kantor | 12 Bulan | 5.890.000 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Kota Bukittinggi | Jenis alat kebersihan yang diadakan | 12 Jenis | 620.199.630 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Kota Bukittinggi | Jenis alat kebersihan yang diadakan | 12 Jenis | 420.060.840 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|-----------|---------------|
| | | | | | | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | | | | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kontrak cleaning service | 10 Orang | | | | Jumlah tenaga kontrak cleaning service | 10 Orang | | |
| | | | | | URUSAN | | | 9.467.312.171 | URUSAN | | | | | |
| | | | | | | Pengeluaran Perkapita | 13.859 | | | | Pengeluaran Perkapita | 13.859 | | |
| | | | | | | Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengelolahan | 5,29% | | | | Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengelolahan | 5,29% | | |
| 3 | 31 | 02 | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Kota Bukittinggi | Presentase IKM Yang Mendapatkan Asistensi Dan Pembinaan | 60 Persen | 6.312.500.000 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Kota Bukittinggi | Presentase IKM Yang Mendapatkan Asistensi Dan Pembinaan | 60 Persen | 1.273.346.120 |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 2 Persen | | | | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 2 Persen | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah IKM Yang Menerapkan Standarisasi Produk | 150 IKM | 6.312.500.000 | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah IKM Yang Menerapkan Standarisasi Produk | 150 IKM | 1.273.346.120 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 0 Dokumen | 2.320.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 0 Dokumen | 305.000.000 |
| | | | | | | | Jumlah IKM yang difasilitasi label halal | 20 IKM | | | | Jumlah IKM yang difasilitasi label halal | 20 IKM | |
| | | | | | | | Jumlah IKM yang difasilitasi packing | 15 IKM | | | | Jumlah IKM yang difasilitasi packing | 15 IKM | |
| | | | | | | | Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi | 0 Orang | | | | Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi | 0 Orang | |
| | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan diversifikasi makanan olahan | 10 Orang | | | | Jumlah peserta pelatihan diversifikasi makanan olahan | 10 Orang | |
| | | | | | | | Jumlah peserta manajemen IKM | 10 IKM | | | | Jumlah peserta manajemen IKM | 10 IKM | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------|---|---|---------------|---|------------------|---|---|-------------|
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat | 0 Dokumen | 3.490.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat | 0 Dokumen | 515.199.400 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah tempat promosi industri yang diadakan Jumlah pemeliharaan gedung UPTD Jumlah operasional UPTD yang dikelola Jumlah IKM yang difasilitasi | 1 gedung 1 gedung 1 UPTD 1 IKM | 502.500.000 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah tempat promosi industri yang diadakan Jumlah pemeliharaan gedung UPTD Jumlah operasional UPTD yang dikelola Jumlah IKM yang difasilitasi | 1 gedung 1 gedung 1 UPTD 1 IKM | 453.146.720 |
| 3 | 31 | 04 | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Kota Bukittinggi | Persentase IKM yang Mendapatkan Asistensi Dan Pembinaan | 55% | 200.000.090 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Kota Bukittinggi | Persentase IKM yang Mendapatkan Asistensi Dan Pembinaan | 55% | 88.326.992 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan Data Dan Informasi Industri | 80% | 200.000.090 | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan Data Dan Informasi Industri | 80% | 88.326.992 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 02 | Sub kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Kota Bukittinggi | Indeks Kemudahan Berusaha Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Persentase Realisasi Investasi Hijau Pertumbuhan PMTB | 65% 0 Dokumen 5% 4% | 200.000.090 | Sub kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Kota Bukittinggi | Indeks Kemudahan Berusaha Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Persentase Realisasi Investasi Hijau Pertumbuhan PMTB | 65% 0 Dokumen 5% 4% | 88.326.992 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|--|------------------|---|--------------|----|---|------------------|---|--------------|-------------|
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan Data SIINAS | 85% | 90 | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | Sub kegiatan Fasilitas pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINAS | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Laporan Industri | 0 | - | | | | | |
| | | | | | | | Pertumbuhan PMTB | 4% | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase realisasi investasi hijau | 5% | | | | | | |
| | | | | | | | Indeks kemudahan berusaha | 66% | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Kota Bukittinggi | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | 60% | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Kota Bukittinggi | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | 60% | 453.289.019 |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 2% | | | | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 2% | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | 150 IKM | | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | 150 IKM | 453.289.019 |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 0 Dokumen | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 0 Dokumen | 453.289.019 |
| | | | | | | | Jumlah Operasional UPTD Yang Dikelola | 1 UPTD | | | | Jumlah Operasional UPTD Yang Dikelola | 1 UPTD | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi yang Difasilitasi | 1 Organisasi | | | | Jumlah Organisasi yang Difasilitasi | 1 Organisasi | |
| | | | | | | | Jumlah pemeliharaan Gedung UPTD | 1 Gedung | | | | Jumlah pemeliharaan Gedung UPTD | 1 Gedung | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kontrak UPTD Kerajinan Industri | 5 Orang | | | | Jumlah Tenaga Kontrak UPTD Kerajinan Industri | 5 Orang | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------|---|------------------|-------------|---|------------------|---|------------------|-------------|
| | | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | | 60% | 90.000.000 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | | | |
| | | | | | Kegiatan Penerbitan IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Kota Bukittinggi | Persentase Penerbitan IUI Kecil dan Menengah | 85% | 90.000.000 | Kegiatan Penerbitan IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Kota Bukittinggi | Kegiatan Penerbitan IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | | |
| | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah peserta bintak/sosialisasi perlindungan HAKI, merk, paten hak cipta dan desain industri | 1 | 90.000.000 | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri | Kota Bukittinggi | | | |
| 2 | 18 | 02 | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Kemudahan Berusaha | 100% | 0 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Kemudahan Berusaha | 100% | 187.437.215 |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Penepatan Pemberian Fasilitas/Intensif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan Regulasi Penanaman Modal | 100% | 0 | Kegiatan Penepatan Pemberian Fasilitas/Intensif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan Regulasi Penanaman Modal | 100% | 187.437.215 |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Peraturan Derah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Peraturan Derah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 187.437.215 |
| 2 | 18 | 05 | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Pengendalian LKPM Yang Dilaksanakan | 55% | 100.000.000 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Pengendalian LKPM Yang Dilaksanakan | 55% | 117.000.000 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pengendalian LKPM Yang Dilaksanakan | 55% | 100.000.000 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pengendalian LKPM Yang Dilaksanakan | 55% | 117.000.000 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 0 Kegiatan Usaha | 100.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 0 Kegiatan Usaha | 117.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------------|--|--|-------------|--|------------------|--|--|-------------|
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Laporan penanaman modal perusahaan Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi | 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Laporan | 0 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Laporan penanaman modal perusahaan Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi | 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Laporan | 0 |
| 2 | 18 | 03 | | | Program Promosi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Nilai Realisasi Investasi Hijau | 65M | 440.000.000 | Program Promosi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Nilai Realisasi Investasi Hijau | 60M | 145.534.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Ketersediaan Media dan Sarana Promosi | 60% | 440.000.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Ketersediaan Media dan Sarana Promosi | 55% | 145.534.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah web promosi yang dikelola | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Web | 200.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah web promosi yang dikelola | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Web | 0 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 2 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti | 1 Dokumen 0 Kerjasama 2 Event | 240.000.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti | 1 Dokumen 0 Kerjasama 2 Event | 145.534.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------|---|---|---------------|---|------------------|--|-----------|---------------|
| 2 | 07 | 03 | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kota Bukittinggi | Persentase Peningkatan Wirausaha Muda Mandiri | 2% | 1.004.450.450 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kota Bukittinggi | Persentase Peningkatan Wirausaha Muda Mandiri | 2% | 1.517.700.900 |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | Kota Bukittinggi | Besaran Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kewirausahaan Besaran Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kewirausahaan | 55% | 317.275.250 | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | Kota Bukittinggi | Besaran Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kewirausahaan Besaran Pencari Kerja Yang Bersertifikat kewirausahaan | 55% | 1.517.700.900 |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Kota Bukittinggi | Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah pesera pelatihan menjahit Bed Cover Jumlah peserta pelatihan reparasi Jumlah peserta pelatihan sablon Jumlah peserta pelatihan Salon Jumlah pserta pelatihan service HP Jumlah pserta pelatihan tata boga Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 48 Orang 16 Orang 16 Orang 32 Orang 16 Orang 32 Orang 48 Orang 0 Orang | 317.275.250 | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Kota Bukittinggi | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun 2023 | 320 orang | 1.517.700.900 |
| 2 | 07 | 4 | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Kota Bukittinggi | Besaran Peningkatan Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 150 orang | 190.000.000 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Kota Bukittinggi | Besaran Peningkatan Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 150 Orang | 21.720.800 |
| 2 | 07 | 4 | 2.01 | | Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja | 100% | 90.000.000 | Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja | 100% | 21.720.800 |
| 2 | 07 | 4 | 2.01 | 2 | Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja | Kota Bukittinggi | Jumlah laporan Penerbitan Kertu Pencari Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 1 Dokumen 0 Orangh | 90.000.000 | Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja | Kota Bukittinggi | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 60 orang | 21.720.800 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|------------------|--|--|-------------|---|------------------|--|--|------------|
| 2 | 07 | 4 | 2.03 | | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Kota Bukittinggi | % Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja | 100% | 100.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Kota Bukittinggi | % Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja | – | 0 |
| 2 | 07 | 4 | 2.03 | 02 | Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kota Bukittinggi | Jumlah Informasi Lowongan Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 1 Dokumen 0 Orang | 100.000.000 | Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kota Bukittinggi | Jumlah Informasi Lowongan Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 1 Dokumen 0 Orang | 0 |
| 2 | 07 | 4 | 2.03 | 03 | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | | Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan | 1 Job Fair | 0 | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | | Jumlah Job Fair Yang Dilaksanakan | 1 Job Fair | 0 |
| 2 | 07 | 5 | | | Program Hubungan Industrial | Kota Bukittinggi | Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial | 0% | 87.000.000 | Program Hubungan Industrial | Kota Bukittinggi | Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial | 0% | 21.049.100 |
| 2 | 07 | 5 | 2.02 | | Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase kasus Hubungan Industrial yang tertangani | 100% | 87.000.000 | Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase kasus Hubungan Industrial yang tertangani | 100% | 21.049.100 |
| 2 | 07 | 5 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan Yang Dibina Persentase Pencegahan Perselisihan | 0 Perkara 30 Perusahaan 100 Persen | 45.000.000 | Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan Yang Dibina Persentase Pencegahan Perselisihan | 0 Perkara 30 Perusahaan 100 Persen | 10.545.500 |
| 2 | 07 | 5 | 2.02 | 02 | Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Persentase kasus yang terselesaikan | 0 Perkara 100 Persen | 42.000.000 | Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 | Kota Bukittinggi | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Persentase kasus yang terselesaikan | 0 Perkara 100 Persen | 10.503.600 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| 2 | 07 | 5 | 2.01 | | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | | – | 65.000.000 | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | | – | 0 |
| 2 | 07 | 5 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Kota Bukittinggi | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Peserta Sosialisasi | 0 Laporan 25 Orang | 65.000.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Kota Bukittinggi | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Peserta Sosialisasi | 0 Laporan 25 Orang | 0 |
| 2 | 18 | 04 | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Unsur Pelayanan berkategori baik | 80% | 1.560.536.831 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Unsur Pelayanan berkategori baik | 80% | 1.194.992.368 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pelayanan perizinan online tepat waktu | 100% | 1.560.536.831 | Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Pelayanan perizinan online tepat waktu | 100% | 1.194.992.368 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara | Kota Bukittinggi | Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan secara online | 3 Aplikasi 100% | 1.270.536.831 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | Kota Bukittinggi | Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan secara online | 3 Aplikasi 100% | 940.849.768 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|--|------------------|--|---|-------------|--|------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Elektronik | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengembangan yang Dilakukan | 0 Pelaku Usaha 1 Laporan | | Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengembangan yang Dilakukan | 0 Pelaku Usaha 1 Laporan | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kontrak | 20 Orang | | | | Jumlah Tenaga Kontrak | 20 Orang | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 2 | Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan Jumlah rancangan produk hukum | 3 Dokumen 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Dokumen | 190.000.000 | Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan Jumlah rancangan produk hukum | 3 Dokumen 0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Dokumen | 148.193.600 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan | Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen IKM Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 2 Dokumen 50 Orang | 100.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan | Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen IKM Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 2 Dokumen 50 Orang | 105.949.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Persentase pengaduan yang tertangani | 100% | | | | Persentase pengaduan yang tertangani | 100% | | |
| 2 | 18 | 06 | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Data Informasi Perizinan Secara Online | 100% | 170.000.000 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kota Bukittinggi | Persentase Data Informasi Perizinan Secara Online | 100% | 20.857.200 |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Laporan Perizinan Tepat Waktu | 100% | 170.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Persentase Laporan Perizinan Tepat Waktu | 100% | 20.857.200 |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 1 | Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Bukittinggi | Jumlah Arsip yang dikelola secara digital | 1 Arsip | 170.000.000 | Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Bukittinggi | Jumlah Arsip yang dikelola secara digital | 1 Arsip | 20.857.200 |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 300 Berkas | | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 300 Berkas | |
| | | | | | | | Jumlah laporan data perizinan | 48 Laporan | | | | Jumlah laporan data perizinan | 48 Laporan | |
| | | | | | Jumlah Total | | | | 22.507.817.216 | Jumlah Total | | | | 14.236.068.306 |

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi, Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan usulan berupa program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan hasil informasi penelitian lapangan dan pengamatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK meliputi program/kegiatan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Penjabaran usulan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut:

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME |
|-----------------|---|------------------|---|---|
| 3 31 02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Kota Bukittinggi | Presentase IKM Yang Mendapatkan Asistensi Dan Pembinaan Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) | 60%; 2% |
| 3 31 02 2.01 | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kota Bukittinggi | Jumlah IKM Yang Menerapkan Standarisasi Produk | 150 IKM |
| 3 31 02 2.01 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah IKM yang difasilitasi label halal Jumlah IKM yang difasilitasi packing Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi Jumlah peserta pelatihan diversifikasi makanan olahan Jumlah peserta pelatihan manajemen IKM | 20 IKM 15 IKM 0 Orang 10 orang 10 ikm |
| 3 31 02 2.01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat | Kota Bukittinggi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen |
| 2 07 03 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kota Bukittinggi | Persentase Peningkatan Wirausaha Muda Mandiri | 2% |
| 2 07 03 2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | Kota Bukittinggi | Besaran Pencari Kerja Yang Bersertifikat Kewirausahaan | 55% |
| 2 07 03 2.01 01 | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Kota Bukittinggi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 320 Orang |

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja harus merujuk pada sasaran dan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan industri di tingkat nasional. DPMPTSPPTK memiliki 3 kewenangan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal, urusan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang industri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan Investasi yang Menarik”. Agar tercapainya visi tersebut, BKPM memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk teknis dari visi. Misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.
Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang dan kebijakan penanaman modal.
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung terciptanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan advokasi terkait pelaksanaan penanaman modal.
Mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.
Mencakup peningkatan kualitas pelayanan perencanaan program serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal.

Sedangkan untuk kewenangan urusan pilihan bidang industri, mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Perindustrian. Visi Kemenperin yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional dan;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk arah dan kebijakan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan yakni sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional, yang dirumuskan dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator pemngeluaran perkapita
2. Meningkatnya investasi hijau, dengan indikator pertumbuhan PMTB dan Persentase realisasi Investasi Hijau
3. Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan industry kecil menengah
2. Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif
3. Meningkatnya kualitas Angkatan kerja
4. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Berpedoman pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, selanjutnya disusunlah Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas PMPTSPPTK berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja 2023 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan DPMPSTPPTK, yang diuraikan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut:

TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA BUKITTINGGI

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|-------------|--------|----------|--------|---|--|--|---|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Progra m | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiata n | | | Tolok Ukur | Targ et | |
| | | | | | TOTAL | | | | | | | | 13.782.779.287 | | | | 24.903.135.832 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 7 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | 1.560.470.800 | | | | 1.015.515.020 |
| 2 | 0 7 3 | 0 3 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | 1.517.700.900 | | | | 825.515.020 |
| 2 | 0 7 3 | 0 3 | 2,0 1 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | 1.517.700.900 | | | | 825.515.020 |
| 2 | 0 7 3 | 0 3 | 2,0 1 | 0 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 % | 320 Orang | 55 persen | 1.517.700.900 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri | 2 % | 825.515.020 |
| 2 | 0 7 4 | 0 4 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | 21.720.800 | | | | 95.000.000 |
| 2 | 0 7 4 | 0 4 | 2,0 1 | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 21.720.800 | | | | 95.000.000 |
| 2 | 0 7 4 | 0 4 | 2,0 1 | 0 2 | Pelayanan antar Kerja | Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Jumlah pencari kerja yang memeiliki kartu pencari kerja | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150 orang | 60 Orang | 100 persen | 21.720.800 | Dana Transfer Umum-DAU | Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | 150 orang | 95.000.000 |
| 2 | 0 7 5 | 0 5 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | 21.049.100 | | | | 95.000.000 |
| 2 | 0 7 5 | 0 5 | 2,0 2 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 21.049.100 | | | | 95.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|--|---|--|--|-------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--|-------|----------------|
| 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penurunan kasus hubungan industrial | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % | 30 Perkara | 100 persen | 10.545.500 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase penurunan kasus hubungan industrial | 0 % | 50.000.000 |
| 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penurunan kasus hubungan industrial | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 % | 30 Perkara | 100 persen | 10.503.600 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase penurunan kasus hubungan industrial | 0 % | 45.000.000 |
| 2 | 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 10.860.635.375 | | | | 15.923.120.812 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 9.194.814.592 | | | | 13.692.530.298 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 21.758.800 | | | | 23.747.850 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi Program dan kegiatan | | BB BB | 2 Dokumen | 100 Persen | 21.758.800 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 23.747.850 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 7.095.981.016 | | | | 8.710.877.196 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | | BB BB | 57 Orang/bul | an100 persen | 7.095.981.016 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 8.710.877.196 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 295.336.236 | | | | 392.631.120 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Nilai Sakip SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah jasa pengamanan kantor | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | | BB BB | 12 bulan 0 Dokumen 9 orang | 100 Persen | 295.336.236 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 392.631.120 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 310.457.700 | | | | 934.883.728 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai Sakip SKPD | Jenis peralatan Listrik yang dibeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 45 Jenis 0 Paket | 100 Persen | 6.122.700 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 6.762.735 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------|--------|---|------------------|--|---|--|-------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------|---------------|
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 6 | 0 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Sakip SKPD | Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 1 Jenis 0 Paket | 100 Persen | 55.710.200 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 551.250.000 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 6 | 0 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Sakip SKPD | Jenis alat tulis yang dibeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 46 jenis 0 Paket | 100 Persen | 23.439.300 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 25.846.018 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 6 | 0 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 7 Jenis 30050 Jenis 90 lbr 0 Paket | 100 Persen | 20.225.500 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 22.303.575 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 6 | 0 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum tamu difasilitasi Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur jumlah makan minum tamu difasilitasi | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 0 Laporan 200 Porsi 12 Bulan | 100 Persen | 19.860.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 9.503.550 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 6 | 0 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri | Persentase tertib administrasi Umum perangkat Daerah | | BB BB | 0 Laporan 90 % | 100 Persen | 185.100.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 319.217.850 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 832.240.000 | 1.911.360.150 | | | | |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 8 | 0 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai Sakip SKPD | Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10000 | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB BB | 12 Bulan 4 Buah 0 Laporan 200 Buah | 90 persen | 3.040.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 4.035.150 |
| 2 | 1 8 | 0 1 | 2,0 8 | 0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Sakip SKPD | Jumlah bulan pembayaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rek air internet listrik telepon yang dibayar | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | BB BB | 12 Bulan 1 Laporan 4 rekenin g | 90 persen | 829.200.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 1.907.325.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|-------------------------------|--|---|--|-------|--|------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 639.040.840 | 878.105.655 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Sakip SKPD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | BB BB | 1 Unit | 100 persen | 39.190.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 45.434.025 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai Sakip SKPD | Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | BB BB | 14 Unit 6 unit | 100 persen | 173.900.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 175.221.869 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Sakip SKPD | Jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | BB BB | 12 Bulan 0 Unit | 100 persen | 5.890.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 6.240.150 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Sakip SKPD | Jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah tenaga kontrak cleaning service | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | | BB BB | 12 Jenis 0 Unit 1 Unit 10 orang | 100 persen | 420.060.840 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai Sakip SKPD | BB BB | 651.209.611 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 187.437.215 | 0 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 187.437.215 | 0 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase kemudahan berusaha | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | persentase pemenuhan regulasi penanaman modal | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 100 persen | 187.437.215 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase kemudahan berusaha | 100 % | 0 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 145.534.000 | 0 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 145.534.000 | 310.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|--|---|--|------------------|--|------------|---------------|------------------------|---|------------------|---------------|
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Nilai realisasi investasi hijau | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti | Persentase ketersediaan media dan sarana promosi | | 60 Milyar Rupiah | 1 Dokumen 0 kerjasama 2 event | 55 persen | 145.534.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Nilai realisasi investasi hijau | 60 Milyar Rupiah | 255.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 1.194.992.368 | 1.628.590.514 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | 1.194.992.368 | 1.628.590.514 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan secara online Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengembangan yang dilakukan Jumlah Tenaga kontrak | persentase pelayanan perizinan online tepat waktu | | 80 % | 3 Aplikasi 100 % 0 Pelaku Usaha 1 Laporan 20 orang | 100 persen | 940.849.768 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | 80 % | 1.398.590.514 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | Jumlah Dokumen standar manajemen mutu pelayanan perizinanJumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman ModalJumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinanJumlah rancangan produk hukum | persentase pelayanan perizinan online tepat waktu | | 80 % | 3 dokumen0 Kegiatan Usaha1 Laporan 1 Dokumen | 100 persen | 148.193.600 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | 80 % | 125.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | Jumlah dokumen IKM Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan persentase pengaduan yang tertangani | persentase pelayanan perizinan online tepat waktu | | 80 % | 2 dok 50 Orang 100 % | 100 persen | 105.949.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase unsur pelayanan berkategori baik | 80 % | 105.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 117.000.000 | 120.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 117.000.000 | 120.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--|---|---|--|--|-------------|--|------------|-------------|------------------------|---|-------------|---------------|
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan | | 55 % | 0 Kegiatan Usaha. | 55 persen | 117.000.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan | 55 % | 0 |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 20.857.200 | 172.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 20.857.200 | 172.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase data informasi perizinan secara online | Jumlah Arsip yang dikelola secara digital Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah laporan data perizinan | persentase laporan dan informasi perizinan tepat waktu | | 100 % | 1 Arsip 300 berkas 48 Laporan | 100 persen | 20.857.200 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase data informasi perizinan secara online | 100 % | 172.000.000 |
| 3 | | | | | Dana Transfer Umum- DAU | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | 908.526.392 | 7.922.000.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | 820.199.400 | 7.722.000.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | 820.199.400 | 7.722.000.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | 0 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | Jumlah DoK Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah IKM yang difasilitasi label halal Jumlah IKM yang difasilitasi packing Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi Jumlah peserta pelatihan diversifikasi makanan olahan Jumlah peserta pelatihan manajemen IKM | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | | 60 % 2 % | 0 Dokumen 20 IKM 15 IKM 0 Orang 10 orang 10 ikm | 150 ikm | 305.000.000 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 60 % 2 % | 2.582.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|--|---------|----------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | 0 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaanPersentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | | 60 %2 % | 0 Dokume n | 150 ikm | 515.199.400 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaanPerse ntase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 60 % 2 % | 5.140.000.000 |
| 3 | 3 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | 88.326.992 | 200.000.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 88.326.992 | 200.000.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | 0 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | Indeks Kemudahan Berusaha Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Persentase Realisasi Investasi Hijau Pertumbuhan PMTB | persentase pemenuhan data dan informasi industri | | 55 % | 65 % 0 Dokume n 5 % 4 % | 80 % | 88.326.992 | Dana Transfer Umum-DAU | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan | 55 % | 200.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 13.329.632.567 | 24.860.635.832 | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | 453.146.720 | 352.500.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | 453.146.720 | 352.500.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | 453.146.720 | 352.500.000 | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2,0 | 0 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Operasional UPTD Yang Dikelola Jumlah organisasi Yang Difasilitasi Jumlah Pemeliharaan Gedung UPTD Jumlah Tenaga kontrak UPTD kerajinan industri | Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk | | 60 % 2 % | 0 Dokume n 1 UPTD 1 Organis asi 1 Gedung 5 orang | 150 IKM | 453.146.720 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | 60 % 2 % | 352.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 13.782.779.287 | 24.903.135.832 | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSPPTK pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Renja Tahun sebelumnya (2021) dan perkiraan capaian target kinerja Renja Tahun berjalan (2022). Evaluasi ini dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kinerja fisik kegiatan, dan penyerapan dana, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya dilakukan perubahan dan inovasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan baik dari segi penetapan indikator kinerja, target kinerja, sampai pada penyusunan anggaran kas.

Berpedoman pada hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut, selanjutnya disusunlah Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas PMPTSPPTK berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja 2023 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSPPTK. Rencana kerja berupa rincian program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pagu pendanaan DPMPTSPPTK Tahun 2023 diuraikan pada Tabel T-C.33 dengan penjelasan masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Sub Kegiatan Job Fair\Bursa Kerja
3. Program Hubungan Industrial
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat arah kebijakan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen untuk memberikan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antara Perangkat Daerah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan.

Dokumen Renja Dinas Penanaman PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan Perindustrian. Sekaligus dapat mendorong capaian tujuan dan sasaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bukittinggi, 30 Juli 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR